

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 55);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng secara efektif, efisien dan akuntabel;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 9 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

: 000.8.3.3 /026.27/BAPENDA/II/2026

: 9 Februari 2026

: PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	000.8.3.3/001/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	SEKRETARIAT
2	000.8.3.3/002/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
3	000.8.3.3/003/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	
4	000.8.3.3/004/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	
5	000.8.3.3/005/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
6	000.8.3.3/006/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
7	000.8.3.3/007/SOP-BAPENDA/2026	Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (CRAAPK)	
8	000.8.3.3/008/SOP-BAPENDA/2026	Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
9	000.8.3.3/009/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	
10	000.8.3.3/010/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Manajemen Risiko	
11	000.8.3.3/011/SOP-BAPENDA/2026	Pengelolaan Website dan Media Sosial	
12	000.8.3.3/012/SOP-BAPENDA/2026	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
13	000.8.3.3/013/SOP-BAPENDA/2026	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	
14	000.8.3.3/014/SOP-BAPENDA/2026	Penyetoran Penerimaan Daerah	
15	000.8.3.3/015/SOP-BAPENDA/2026	Transfer Dana Atas Belanja	
16	000.8.3.3/016/SOP-BAPENDA/2026	Penempatan Pegawai	
17	000.8.3.3/017/SOP-BAPENDA/2026	Peningkatan Kompetensi Pegawai	

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	KETERANGAN
1	2	3	4
18	000.8.3.3/018/SOP-BAPENDA/2026	Pengelolaan Surat Masuk	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
19	000.8.3.3/019/SOP-BAPENDA/2026	Pengelolaan Surat Keluar	
20	000.8.3.3/020/SOP-BAPENDA/2026	Penerimaan Tamu	
21	000.8.3.3/021/SOP-BAPENDA/2026	Pengadaan Barang dan Jasa	
22	000.8.3.3/022/SOP-BAPENDA/2026	Seleksi Penyedia Barang dan Jasa	
23	000.8.3.3/023/SOP-BAPENDA/2026	Evaluasi Penyedia	
24	000.8.3.3/024/SOP-BAPENDA/2026	Pemeliharaan Inventaris	
25	000.8.3.3/025/SOP-BAPENDA/2026	Perbaikan Barang Inventaris	
26	000.8.3.3/026/SOP-BAPENDA/2026	Keamanan dan Ketertiban	
27	000.8.3.3/027/SOP-BAPENDA/2026	Pengelolaan Kebersihan	
28	000.8.3.3/028/SOP-BAPENDA/2026	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)	
29	000.8.3.3/029/SOP-BAPENDA/2026	Penyaluran Barang Milik Daerah	
30	000.8.3.3/030/SOP-BAPENDA/2026	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
31	000.8.3.3/031/SOP-BAPENDA/2026	Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Berupa Tanah	
32	000.8.3.3/032/SOP-BAPENDA/2026	Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Berupa Bangunan	
33	000.8.3.3/033/SOP-BAPENDA/2026	Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin (Latsin)	
34	000.8.3.3/034/SOP-BAPENDA/2026	Pengembalian Atas Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)	
35	000.8.3.3/035/SOP-BAPENDA/2026	Penerbitan SK NJOP atau SPPT PBB P2	
36	000.8.3.3/036/SOP-BAPENDA/2026	Aktifkan NOP (Nomor Objek Pajak)	
37	000.8.3.3/037/SOP-BAPENDA/2026	Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) secara Online	
38	000.8.3.3/038/SOP-BAPENDA/2026	Mutasi 2 in 1 Service	
39	000.8.3.3/039/SOP-BAPENDA/2026	Penetapan Pajak Reklame	

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	KETERANGAN
1	2	3	4
40	000.8.3.3/040/SOP-BAPENDA/2026	Penetapan Pajak Air Tanah	
41	000.8.3.3/041/SOP-BAPENDA/2026	Pengelolaan Pengaduan	
42	000.8.3.3/042/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	
43	000.8.3.3/043/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP)	
44	000.8.3.3/044/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik	
45	000.8.3.3/045/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik	
46	000.8.3.3/046/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik	
47	000.8.3.3/047/SOP-BAPENDA/2026	Prosedur Fasilitas Sengketa	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP
Pembina (IV/a)
NIP.197602102010011016